

**KERJASAMA SOSIAL DAN EKONOMI MALAYSIA-INDONESIA
(SOSEKMALINDO)
(Studi Kasus Pengembangan Kawasan Pariwisata di Kabupaten Sambas)**

Mutia Asmarani¹, Bakran Suni², Nurfitri Nugrahaningsih³

Program Studi Ilmu Politik
Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Kabupaten Sambas memiliki banyak potensi dan sumber daya alam yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata yang tidak kalah bagusnya dengan daerah-daerah lain yang ada di Kalimantan Barat. Mengingat letak kawasan Kabupaten Sambas ini sangat strategis berbatasan langsung dengan Malaysia Timur, maka diharapkan nantinya akan ada peluang kerjasama dalam bidang pariwisata dengan Malaysia Timur. Upaya dan program pariwisata telah dilakukan oleh kedua Negara melalui kerjasama Sosek Malindo. Upaya-upaya yang dilakukan Tim Teknis Sosek Malindo Bidang Pariwisata/pelelancongan dan Kebudayaan dalam pengembangan kawasan pariwisata sudah terlaksana, hanya saja masih ada kendala-kendala atau faktor-faktor penghambat bagi pemerintah untuk mengembangkan kawasan wisata ketahap yang memungkinkan. Faktor-faktor penyebab Tim Teknis Sosek Malindo Bidang Pariwisata/pelelancongan dan Kebudayaan Tingkat Daerah Kalbar belum dapat berperan secara optimal dalam pengembangan kawasan pariwisata di Kabupaten Sambas adalah lemahnya diplomasi dan kurangnya komitmen pemerintah untuk melibatkan pihak-pihak diluar Pemerintah.

Kata kunci: Kerjasama, Sosek Malindo, Perbatasan, Pariwisata.

¹ PNS – Kab Melawi

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia dan Malaysia telah bekerjasama sejak lama. Berbagai kerja sama telah dilakukan Indonesia dengan Malaysia hingga saat ini, sehingga tercipta hubungan baik diantara kedua negara. Kerjasama yang dilakukan meliputi berbagai bidang antara lain di bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang sosial, kerjasama anti teroris. Dalam bidang pendidikan, antara Indonesia dan Malaysia menjalin hubungan dengan mengadakan pertukaran pelajar setiap tahunnya. Dalam Bidang Ekonomi, banyaknya investor-investor dari Malaysia yang berinvestasi di Indonesia telah sedikit banyak membantu pemerintah Indonesia di dalam mengentaskan pengangguran. Investor dari Malaysia banyak menanamkan investasinya dalam industri perkebunan kelapa sawit.

Salah satu wilayah perbatasan Indonesia yang mempunyai tingkat aktivitas dan interaksi perdagangan-ekonomi cukup tinggi adalah perbatasan antara Provinsi Kalimantan Barat dengan Malaysia. Hal tersebut dapat dilihat dari perdagangan tradisional yang sudah lama terjadi antar masyarakat di perbatasan Indonesia dan Malaysia. Perilaku interaksi masyarakat perbatasan di kedua negara tersebut dipicu oleh adanya kesamaan adat-istiadat, etnis dan juga bahasa yang mereka miliki. Kesamaan-kesamaan sosio-kultural itu yang kemudian memunculkan terciptanya hubungan sosial dan ekonomi secara tradisional di antara mereka. Faktor kesamaan-kesamaan tersebut tentu saja dapat menjadi modal dasar untuk melakukan interaksi yang saling menguntungkan. Maka dari itu, Pemerintah Indonesia dan Malaysia membuat kesepakatan berupa kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia atau disingkat menjadi Sosek Malindo.

Kerjasama Sosek Malindo pertama dicetuskan oleh Datu Musa Hitam, wakil Perdana Menteri Malaysia sekaligus ketua "General Border Commite" (GBC) Malaysia, yang disampaikan pada sidang XII GBC di Kuala Lumpur pada tanggal 14 November 1983. Kerjasama yang dibahas dalam kerjasama Sosek Malindo terkait dalam beberapa bidang antara lain :

1. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari: Pendidikan, Kesehatan, Kesenian dan Kebudayaan dan Pemuda dan Olahraga
2. Bidang Ekonomi, perdagangan dan perhubungan, terdiri dari: Industri dan Perdagangan, Pertanian, Pelabuhan/investasi, Pelancongan/pariwisata, Perhubungan, Tenaga kerja, Sumberdaya Alam dan Lingkungan hidup
3. Bidang Keselamatan/Keamanan dan Pengurusan Sempadan, terdiri atas: Pos Lintas Batas Darat (PLBD), Pos Lintas Batas Laut (PLBL), Kerjasama Pendidikan Pencegahan Penyeludupan dan Infrastruktur Sempadan.

Kabupaten Sambas merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Kalimantan Barat dengan batas administratif yaitu, sebelah utara berbatasan dengan Serawak, Malaysia Timur, sebelah selatan berbatasan dengan Kota Singkawang, sebelah barat berbatasan dengan Laut Natuna, Samudera Pasifik, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang. Mengingat letak kawasan Kabupaten Sambas ini sangat strategis yaitu berbatasan langsung dengan Malaysia Timur, maka diharapkan nantinya akan ada peluang kerjasama dalam bidang pariwisata dengan Malaysia Timur. Kabupaten Sambas juga memiliki berbagai potensi dibidang pariwisata yang tidak kalah bagusnya dengan daerah-daerah lain yang ada di Kalimantan Barat.

Pariwisata di daerah perbatasan Kabupaten Sambas memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai objek wisata bagi turis lokal dan mancanegara seperti Malaysia. Namun secara riil semua potensi tersebut masih belum mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengusahakannya secara profesional. Adapun program yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Sambas untuk meningkatkan pariwisata daerah adalah dengan melakukan program pengembangan nilai-nilai budaya, pengelolaan kekayaan budaya dengan kegiatan, program pengembangan pemasaran pariwisata, program pengembangan destinasi pariwisata dan program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya. Objek wisata di Kabupaten Sambas seperti Istana Sambas, Air Terjun Riam

Caggat, Danau Sebedang, Tanah Hitam, Pantai Tanjung Kemuning, Patung Bunda Maria dan Air Terjun Gunung Selindung.

Jumlah wisatawan yang keluar masuk ke Kalimantan Barat dapat melalui Kota Pontianak dan melewati daerah perbatasan. Secara keseluruhan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Kalimantan Barat pada April 2013 mencapai 1.688 orang, mengalami penurunan sebesar 37,41 persen dibanding bulan Maret 2013. Jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Kalimantan Barat pada Bulan April 2013 sangat dipengaruhi oleh jumlah wisatawan mancanegara yang datang melalui pintu masuk Entikong, yang memberikan kontribusi sebesar 81,40 persen, dan sisanya sebesar 18,60 persen melalui pintu masuk Pontianak (Supadio). Jumlah wisatawan mancanegara melalui pintu masuk Entikong pada April 2013 sebanyak 1.374 orang mengalami penurunan sebesar 39,42 persen dibandingkan bulan Maret 2013 yaitu sebesar 2.268 orang. Sedangkan dengan jumlah wisman yang masuk melalui pintu masuk Pontianak (Supadio), pada Bulan April 2013 sebesar 314 orang mengalami penurunan sebesar 26,81 persen dibandingkan dengan Bulan Maret 2013 sebesar 429 orang. Hal ini mungkin disebabkan telah diresmikannya Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Aruk di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas pada tanggal 1 Januari 2011 (Harian Equator, Kamis, 22 September 2011). PPLB Aruk-Sajingan Besar Kabupaten Sambas belum dapat beroperasi secara optimal karena menunggu kesiapan dari pihak Malaysia. Kemudian kurangnya sarana dan prasarana yang menjadi kendala utama seperti pembangunan jalan dan fasilitas kelengkapan border seperti Bank dan *Money Changer*.

Padahal mengingat jalur border ini yang lebih strategis dibandingkan dengan 2 pintu masuk yaitu melalui Pontianak (Supadio) dan Entikong, karena mengingat jaraknya yang dekat dengan Malaysia yang hanya menempuh waktu kurang lebih 4 jam. Sehingga wisatawan mancanegara yang ingin berkunjung ke Indonesia lebih memilih untuk dapat masuk melalui PPLB Aruk-Sajingan Besar di Kabupaten Sambas. Hal ini merupakan keuntungan yang besar bagi pemerintah daerah Kabupaten Sambas untuk menyusun rencana maupun strategi pembangunan serta meningkatkan PAD nya melalui pengembangan kawasan pariwisata, mengingat banyaknya potensi/objek wisata yang ada di Kabupaten Sambas, sehingga dapat meningkatkan perkembangan pariwisata di Kabupaten Sambas.

Kerjasama Sosek Malindo dalam penelitian ini lebih difokuskan pada bidang pariwisata khususnya pengembangan kawasan pariwisata di Kabupaten Sambas. Kerjasama di bidang pariwisata tertuang dalam memorandum saling pengertian antara pemerintah Indonesia dan Malaysia pada tahun 1990 yang menyebutkan bahwa kedua belah pihak akan berusaha memajukan kerjasama pariwisata pada bidang-bidang yang meliputi: penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, promosi, pertukaran program antar kedua negara, promosi regional, perhubungan udara dan kerjasama sektor wisata. Potensi wisata di Kabupaten Sambas cukup banyak dan menarik tidak jauh berbeda halnya dengan daerah-daerah lainnya di nusantara yang kaya dengan sumber daya baik alam seperti pantai, hutan, dan danau maupun budaya seperti tari tradisional, kain tenun dan lain-lain. Berdasarkan kondisi demikian maka, penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana kerjasama Sosek Malindo khususnya dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Sambas.

B. Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup penelitian ini adalah kerjasama Sosek Malindo (Sosial Ekonomi Indonesia dan Malaysia) dalam kerjasamanya dibidang pariwisata.

C. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kerjasama Sosek Malindo khususnya dalam pengembangan kawasan pariwisata di Kabupaten Sambas.

TINJAUAN PUSTAKA

Gagasan untuk melaksanakan kerjasama Sosek Malindo pertama kali dicetuskan oleh Dato Musa Hitam, Wakil Perdana Menteri Malaysia, Ketua *General Border Committee* (GBC)

Malaysia yang disampaikan pada Sidang XII GBC di Kuala Lumpur pada tanggal 14 November 1983. Gagasan ini terungkap ketika beliau membuka Sidang XII GBC, ia menyatakan bahwa kerjasama Sosek Malindo di kawasan perbatasan pasti akan memberikan banyak manfaat bagi kesejahteraan rakyat. Kemudian dalam sidang XVII *Staff Planning Committee* (SPC) Malindo yang diselenggarakan di Kuala Lumpur pada tanggal 28 September 1984, Kelompok Kerja/Kumpulan Kerja telah menyampaikan laporannya tentang perlunya untuk membentuk suatu Komite /Jawatan Kuasa Khusus yang bertanggung jawab dalam bidang kerjasama pembangunan kawasan perbatasan Sosek Malindo. Setelah mempelajari kertas kerja dan usul yang disampaikan, maka sidang XVII SPC Malindo, menerima dan menyetujui saran/usul yang disampaikan Kelompok Kerja. Selanjutnya SPC Malindo sebagai koordinator perencanaan kegiatan GBC menugaskan beberapa pejabat untuk merintis usaha-usaha untuk tercapainya kerjasama pembangunan sosial ekonomi tersebut.

1. Konsep Wilayah Perbatasan

Konsep yuridis Romawi mengenai wilayah perbatasan, sesuai dengan isu yang berkembang pada saat itu sudah mencirikan adanya penetapan wilayah dan konsep kerjasama sesuai dengan peraturan dan pemerintahan yang berkuasa. Konsep kerjasama dan penetapan batas ditentukan oleh kedua pihak yang bertetangga seperti yang dikatakan oleh Aelenei (2001), bahwa definisi dari perbatasan adalah sebagai berikut:

“a definition of the border; a method of setting, delimiting and marking it; the papers drawn up by the neighbouring states stipulating the border line; the manner the state referred to regards the issue of bilateral border regime; the internal legislation regarding the border juridical regime”(Aelenei, 2001: 112).

Dalam perkembangannya, perbatasan tersebut dibentuk untuk melaksanakan kebijakan pemerintah yang meliputi: mengelola dan mengawasi territorial status quo dan mengawasi territorial kekuasaan dengan peraturan yang dipengaruhi wilayah lainnya. Pengertian border seringkali diartikan sebagai batas dari teritorial politik dan ruang tempat tinggal. Pada beberapa kasus, border memiliki arti yang lebih luas bagi kondisi politik dan ekonomi geografis dengan kasus tertentu untuk membagi kekuasaan atas wilayah yang berbatasan (Guo, 2005: 5). Border area atau dengan sinonim yang sama yaitu cross-border area secara luas berkaitan dengan heterogenitas spasial dalam istilah struktur ekonomi dan politik dengan terdiri atas dua atau lebih kekuasaan.

Berkaitan dengan perwujudan fisik batas wilayah perbatasan, menurut Guo (2005 : 8), batas wilayah tersebut dapat dibagi menjadi beberapa pendekatan:

- *Natural Border*, yaitu wilayah dibatasi oleh batas alam seperti gunung, sungai, danau, laut, pantai, atau selat. Karena urgensinya terhadap kepentingan pertahanan batas tersebut seringkali dianggap sebagai batas politik.
- *Artificial Border*, yaitu batas wilayah yang dapat terdiri dari batas buatan (batu, dinding), batas geometris (menggunakan batas koordinat bumi), dan batas kultural/budaya (perbedaan budaya, etnis, ideologi).

2. Konsep Pariwisata

Istilah pariwisata berasal dari kata pari yang berarti banyak atau berkali-kali dan wisata yang berarti berpergian dengan tujuan bersenang-senang baik sendirian maupun kelompok (Kamus Tata Ruang, 2007:145). Didalam UU No.10 tahun 2009 tentang Kepariwisata disebutkan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pariwisata juga berarti perpindahan orang untuk sementara dan dalam jangka waktu pendek ke tujuan-tujuan diluar tempat mereka biasanya hidup dan bekerja, dan kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di tempat-tempat tujuan tersebut dan biasanya wisatawan tersebut membelanjakan uangnya (Soekadijo, 2000 : 144). Sedangkan

menurut McIntosh (1995 : 132) pariwisata didefinisikan sebagai gabungan gejala dan hubungan yang timbul dari interaksi wisatawan, bisnis, pemerintah serta masyarakat dalam proses menarik dan melayani wisatawan.

Pariwisata menurut Fandeli (1995 : 178) juga berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan wisata termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang tertarik di bidang tersebut. Menurut Yoeti (1990), pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu dan diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan tujuan semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya atau memenuhi keinginan yang beraneka ragam. Sedangkan Wahab (1992 : 211) memandang pariwisata sebagai suatu kegiatan kemanusiaan yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara bergantian diantara orang-orang di daerah tertentu untuk sementara waktu dalam mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang dialaminya ditempat ia memperoleh pekerjaan tetap.

Sedangkan menurut Gunn (1988 : 188), pariwisata sebagai sebuah aktivitas ekonomi yang memiliki aspek permintaan (*demand side*) dan aspek penawaran (*supply side*) sehingga diperlukan sebuah kemampuan perencana untuk menghasilkan sebuah rencana pengembangan pariwisata yang dapat mengintegrasikan dua aspek permintaan dan penawaran tersebut agar tercapai keberhasilan perencanaan pengembangan pariwisata di suatu daerah. Melihat beberapa pengertian tentang pariwisata tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa pariwisata membicarakan suatu perjalanan oleh seseorang atau sekelompok orang ke suatu tempat/objek wisata yang dilakukan untuk sementara waktu untuk bertamasya dan menikmati segala fasilitas dan pelayanan yang disediakan tempat tujuan tersebut. Apabila dikaitkan dengan pariwisata air maka segala sesuatu yang dikaitkan dengan bertamasya dengan kegiatan menikmati objek wisata kawasan perairan dengan fasilitas dan pelayanan tersedia yang mendukung kegiatan atraksi wisata air.

Pariwisata sebagai suatu sistem berarti pariwisata mempunyai komponen-komponen yang menjadi sub sistem dan komponen tersebut saling berinteraksi dan terkait satu sama lain. Ada berbagai macam literatur yang dibuat mengenai komponen wisata, menurut Mill dan Morrison (Giddens, 1985 : 166) pariwisata sebagai sebuah sistem yang terikat satu sama lain dengan komponennya adalah perjalanan wisata, pasar wisata, tujuan wisata dan pemasaran wisata. Dari keterkaitan tersebut, terdapat elemen-elemen pariwisata yaitu aspek permintaan (*demand*) yaitu jumlah total dari orang-orang yang melakukan perjalanan dengan cara menggunakan fasilitas wisata beserta pelayanannya di tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka maupun tempat mereka bekerja, dan yang kedua adalah aspek pelayanan (*supply*) yang terdiri dari berbagai macam jenis fasilitas dan pelayanan yang digunakan wisatawan dan bisa dikelompokkan ke dalam beberapa sektor yaitu atraksi, akomodasi, transportasi, infrastruktur serta fasilitas dan jasa lainnya.

Bentuk kerjasama antara Malaysia dan Indonesia dalam bidang pariwisata adalah sebagai berikut (Memorandum Kerjasama Malaysia-Indonesia, 1990):

1. Penelitian dan Pengembangan
2. Pendidikan dan Pelatihan
3. Promosi
4. Pertukaran Program
5. Promosi Regional
6. Perhubungan Udara
7. Kerjasama sektor Wisata

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif dengan metode kualitatif yang dilakukan di Kabupaten Sambas yang memiliki beberapa tempat wisata yang dapat dikembangkan dan menjadi potensi pariwisata bagi Kabupaten Sambas antara lain: Istana Sambas, Danau Sebandang, Pantai Tanah Hitam, Pantai Tanjung Kemuning, Air Terjun Riam Cagat, Panorama Gua Alam Santok, Pantai Selimpai, Pantai Jawai, Pantai Polaria, Pantai

Temajuk, Air Terjun Gunung Selindung, dan Pantai Tanjung Batu Pemangkat sehingga dalam pengembangan pariwisata pada daerah Kabupaten Sambas dapat menarik minat wisatawan mancanegara yaitu terutama wisatawan yang berasal dari Malaysia di daerah Sarawak. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan teknik *purposive* (bertujuan), yang terdiri dari : a) Ketua Sosek Malindo Provinsi Kalimantan Barat, b) Tim Teknis Sosek Malindo Bidang Pelancongan/Pariwisata Tingkat Daerah Kalbar, c) Badan Pengelola Kawasan Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Kalimantan Barat, d) Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Kalimantan Barat, e) Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sambas. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi dengan alat berupa daftar *checklist* dan pedoman wawancara.

HASIL PENELITIAN

A. Kerjasama Sosek Malindo

1. Sejarah Kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia

Indonesia dan Malaysia telah bekerjasama sejak lama. Berbagai kerja sama telah dilakukan Indonesia dengan Malaysia hingga saat ini, sehingga tercipta hubungan baik diantara kedua negara. Kerjasama yang dilakukan meliputi berbagai bidang antara lain di bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang sosial, kerjasama anti teroris. Dalam bidang pendidikan, antara Indonesia dan Malaysia menjalin hubungan dengan mengadakan pertukaran pelajar setiap tahunnya. Dalam Bidang Ekonomi. Banyaknya investor-investor dari Malaysia yang berinvestasi di Indonesia telah sedikit banyak membantu pemerintah Indonesia di dalam mengentaskan pengangguran. Investor dari Malaysia banyak menanamkan investasinya dalam industri perkebunan kelapa sawit.

Di bidang perkebunan kelapa sawit, Indonesia-Malaysia telah setuju untuk memperkuat pasar, meningkatkan kapasitas perdagangan, memfasilitasi praktik perdagangan yang adil, dan berpartisipasi dalam misi investasi dan bisnis. Kedua negara saat ini menguasai 80 persen produksi sawit dunia. Hal ini tentu menguntungkan bagi kedua belah pihak. Selain itu di bidang sosial, di Malaysia juga banyak di tempatkannya Tenaga Kerja dari Indonesia yang bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga(PRT), petugas medis, pekerja bangunan serta tenaga profesional lainnya.

Salah satu wilayah perbatasan Indonesia yang mempunyai tingkat aktivitas dan interaksi perdagangan-ekonomi cukup tinggi adalah perbatasan antara Provinsi Kalimantan Barat dengan Malaysia. Hal tersebut dapat dilihat dari perdagangan tradisional yang sudah lama terjadi antar masyarakat di perbatasan Indonesia dan Malaysia. Perilaku interaksi masyarakat perbatasan di kedua negara tersebut dipicu oleh adanya kesamaan adat-istiadat, etnis dan juga bahasa yang mereka miliki. Kesamaan-kesamaan sosio-kultural itu yang kemudian memunculkan terciptanya hubungan social dan ekonomi secara tradisional di antara mereka. Faktor kesamaan-kesamaan tersebut tentu saja dapat menjadi modal dasar untuk melakukan interaksi yang saling menguntungkan.

Untuk mengatur lalu-lintas barang (perdagangan tradisional) antar masyarakat perbatasan, maka kedua pemerintahan baik Republik Indonesia dan Kerajaan Malaysia pun membuat sebuah kesepakatan berupa *Border Trade Agreement* (BTA) atau “Perjanjian Tentang Perdagangan Lintas Batas antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Malaysia.” Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 24 Agustus 1970 di Jakarta. Salah satu isi kesepakatannya berupa kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia atau disingkat menjadi Sosek Malindo.

Adapun visi dari kerjasama Sosek Malindo ini adalah: “*Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kedua daerah melalui kerjasama Sosek Malindo menuju 2020.*” Agar visi kerjasama ini dapat direalisasikan, maka misi yang dilaksanakan adalah: *pertama*, menciptakan kondisi sosial ekonomi dan budaya yang kondusif bagi kesejahteraan masyarakat masing-masing daerah; *kedua*, meningkatkan kerjasama ekonomi yang berkeadilan dan saling menguntungkan serta berorientasi kelestarian lingkungan; *ketiga*, meningkatkan kerjasama

sosial budaya lewat peningkatan kualitas dan pemberdayaan SDM di kedua daerah perbatasan. Kerjasama perbatasan antara dua negara Republik Indonesia-Malaysia pada awalnya dimulai dengan bidang keamanan pada sejak tahun 1967. Persetujuan mengenai Pengaturan Dalam Bidang Keamanan Daerah-Daerah Perbatasan, ini kemudian direvisi untuk pertama kali pada tahun 1972, dan direvisi untuk yang kedua kali pada tahun 1984. Dalam revisi yang kedua ini kerjasama perbatasan antara Republik Indonesia-Malaysia mengalami perluasan area cakupan kerjasama hingga mencakup/ merangkumi berbagai jenis bidang yaitu ideologi, politik, sosial, budaya dan ekonomi. Menindaklanjuti kesepakatan tersebut, maka sejak tahun 1985 telah terbentuklah forum kerjasamasosial ekonomi daerah (Sosekda) Provinsi Kalimantan Barat-Negeri Serawak, dan Sosekda Provinsi Kalimantan Timur- Negeri Sabah dimulai sejak tahun 1995 (dalam Fuad Asaddin, "TOR Kerjasama Sosek Malindo perlu disempurnakan", dalam <http://www.tastawima.com> diunduh pada tanggal 25 November 2010).

Hubungan kerjasama Sosek Malindo tingkat daerah Kalbar -Serawak yang dimulai sejak tahun 1985 sampai sekarang masih terus berlangsung. Memasuki tahun ke-15 hubungan kerjasama ini mengalami dinamika yang sangat berwarna, dan tentunya banyak sudah program-program kerja yang telah disepakati dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masing-masing perbatasan di kedua negara. Program-program kerjasama tersebut ada yang sudah terlaksana dan ada pula yang belum dapat dilaksanakan. Forum kerjasama Sosek Malindo ini mengadakan program pertemuan setahun sekali dengan tempat saling bergantian antara Indonesia dan Malaysia. Dalam strukturnya, Sosek Malindo diketuai oleh *General Border Committee* (GBC) di masing-masing Negara.

Gagasan untuk melaksanakan kerjasama Sosek Malindo pertama kali dicetuskan oleh Dato Musa Hitam, Wakil Perdana Menteri Malaysia, Ketua General Border Committee (GBC) Malaysia yang disampaikan pada Sidang XII GBC di Kuala Lumpur pada tanggal 14 November 1983. Gagasan ini terungkap ketika beliau membuka Sidang XII GBC, ia menyatakan bahwa kerjasama Sosek Malindo di kawasan perbatasan pasti akan memberikan banyak manfaat bagi kesejahteraan rakyat. Kemudian dalam Sidang XVII *Staff Planning Committee* (SPC) Malindo yang diselenggarakan di Kuala Lumpur pada tanggal 28 September 1984, Kelompok Kerja/Kumpulan Kerja telah menyampaikan laporannya tentang perlunya untuk membentuk suatu Komite /Jawatan Kuasa Khusus yang bertanggung jawab dalam bidang kerjasama pembangunan kawasan perbatasan Sosek Malindo. Setelah mempelajari kertas kerja dan usul yang disampaikan, maka Sidang XVII SPC Malindo, menerima dan menyetujui saran/usul yang disampaikan Kelompok Kerja, selanjutnya menyampaikan keputusan itu ke Sidang XIII GBC Malindo untuk mendapatkan persetujuan.

Berdasarkan laporan Ketua Bersama SPC Malindo, maka Sidang XIII GBC Malindo yang diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 3 Desember 1984, Ketua Bersama GBC Malindo telah memberikan arahan/intruksi sebagai berikut "SPC supaya membentuk suatu Komite/Jawatan Kuasa Bersama yang bertugas untuk merencanakan/merancang dan mengkoordinasikan Pembangunan Sosek Malindo demi keamanan/berkaitan dengan keselamatan daerah perbatasan kedua negara. Berdasarkan arahan Ketua Bersama GBC Malindo pada Sidang XIII GBC dan Sidang XVII SPC Malindo tersebut, telah dibahas kertas kerja mengenai kerjasama Sosek Malindo. Kemudian Sidang memutuskan menerima dan meluluskan pembentukan Kelompok Kerja/Jawatan Kuasa (KK/JKK) Bersama Pembangunan Sosek Malindo, bidang tugas, keanggotaan serta kegiatannya. Kemudian pada Sidang XVII SPC Malindo berhasil mencapai kesepakatan bahwa Kelompok Kerja Bersama Pembangunan, bidang tugas, keanggotaan dan kegiatannya diterima. Hasil Sidang ini disahkan pada Sidang XIV GBC Malindo pada tahun 1985. Kelompok kerja ini diberikan kuasa untuk melaksanakan pertemuan-pertemuan secara timbale balik dan melaporkan kegiatan-kegiatannya kepada Sidang GBC Malindo melalui Sidang SPC Malindo.

Kerjasama perbatasan kedua negara dimulai dengan bidang keamanan pada sejak tahun 1967. Persetujuan mengenai Pengaturan Dalam Bidang Keamanan Daerah-Daerah Perbatasan, ini direvisi untuk pertama kali pada 1972, dan revisi kedua 1984. Dalam revisi kedua ini kerjasama perbatasan RI-Malaysia diperluas hingga mencakup/merangkumi berbagai

jenis bidang yaitu ideologi, politik, sosial, budaya dan ekonomi. Menindak lanjuti kesepakatan tersebut, sejak tahun 1985 telah terbentuklah forum kerjasama sosial ekonomi daerah (Sosekda) Kalimantan Barat-Serawak. Sampai dengan tahun 2010, GBC membawahi 3 (tiga) bidang kerjasama, meliputi keamanan (*High Level Committee*), masalah batas antar Negara (*Border Management Working Group Level Committee*) dan kerjasama SOSEK. Dalam kerjasama Sosek Malindo ini telah terbentuk 4 (empat) daerah kerjasama Sosek Tingkat Provinsi. Ketua Kerjasama (KK) Sosek Tingkat Pusat Indonesia membawahi KK Sosek Tingkat Provinsi Kalbar.

Di Provinsi Kalbar hingga saat ini belum ada lembaga khusus yang menangani wilayah perbatasan. Sejauh ini penanganan perbatasan masih bersifat parsial, temporer dan ad hoc (bersifat sementara) dengan *leading sector* yang berbeda-beda (secara sektoral) sehingga penanganannya tidak memberikan hasil yang optimal. Penanganan wilayah perbatasan selama ini selain dilakukan oleh unit-unit pelaksana teknis (badan-badan dan dinas-dinas di provinsi dan kabupaten), juga dilakukan dalam kerangka kerjasama bilateral dengan Sosek Malindo. Dasar hukum pembentukan Sosek Malindo adalah Keppres No. 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Sub Regional.

Kedudukan Sosek Malindo dalam instansi Pemerintah Provinsi Kalbar secara struktural melekat pada Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Kalbar selaku Sekretariat Sosek Malindo yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Kalbar sebagai Ketua Tim Teknis Kelompok Kerja/Jawatan Kuasa Kerja Sosek Malindo. Sosek Malindo merupakan forum kerjasama dibidang sosial ekonomi yang dilandasi oleh latar belakang politik mengenai wilayah perbatasan Malaysia (Sabah dan Sarawak) dengan Indonesia (Kalbar). Sosek Malindo diketuai oleh *General Border Committee* (GBC) di masing-masing negara dan untuk Indonesia Ketua GBC adalah Panglima TNI. Kedudukan GBC berada di bawah lembaga *Join Commission Meeting* RI-Malaysia (JCM) yang diketuai oleh Menteri Luar Negeri. Adapun tugas Sosek Malindo antara lain adalah:

1. Menentukan proyek-proyek pembangunan sosial ekonomi yang digunakan bersama-sama.
2. Merumuskan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan sosial ekonomi dan wilayah perbatasan.
3. Melaksanakan pertukaran informasi mengenai pembangunan sosial ekonomi di wilayah perbatasan bersama.

Kelompok Kerja Sosek Indonesia terdiri dari dua tingkat yaitu tingkat pusat dan daerah. Sosek Malindo tingkat pusat berkedudukan di Staf Teritorial TNI (Ster TNI) yang diketuai oleh Asisten Teritorial Kasum TNI (Aster Kasum TNI). Sedangkan Sosek Malindo tingkat daerah Kalimantan Barat berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Barat. Ketua Sosek Malindo tingkat daerah Kalimantan Barat adalah Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan struktur tersebut, Kelompok Kerja Sosek Malindo merupakan staf tingkat pusat yang bertanggung jawab kepada GBC melalui SPC. Sedangkan Kelompok Kerja Sosek Malindo tingkat daerah kedudukannya adalah sebagai pembantu KK Sosek Malindo tingkat pusat dengan tugas pokok mengkaji secara detil kerjasama sosial ekonomi di daerah/negeri dan memantau pelaksanaannya sesuai dengan arahan Sosek Malindo tingkat pusat. Untuk kelancaran tugas pokoknya, KK Sosek Malindo tingkat daerah dapat membentuk Kelompok Kerja Teknis (Tim Teknis).

Sidang Sosek Malindo dilaksanakan sekali dalam setahun dan pelaksanaannya dilakukan secara bergiliran di Indonesia maupun Malaysia. Seperti terlihat dalam struktur organisasi, mekanisme pelaksanaan Sidang dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pertemuan Tim Teknis.
2. Pertemuan Sekretariat Bersama
3. Sidang Sosek Malindo Tingkat Daerah
4. Sidang Sosek Malindo Tingkat Pusat
5. *Sidang Staff Planning Committee*

2. Bentuk Kerjasama Sosek Malindo

Sejak terbentuknya kerjasama Sosek Malindo pada tahun 1980 sampai 2003, telah terbentuk 8 (delapan) tim teknis yang sudah melakukan beberapa kali Sidang yang dilakukan setiap tahunnya secara bergiliran baik di Indonesia maupun Malaysia. Tim-tim teknis yang telah terbentuk dalam kerjasama Sosek Malindo adalah sebagai berikut:

1. Tim Teknis Ekonomi
2. Tim Teknis Perhubungan Dan Asuransi
3. Tim Teknis Pariwisata Dan Kebudayaan
4. Tim Teknis Kesehatan
5. Tim Teknis Pemberantasan Dan Pencegahan Penyelundupan
6. Tim Teknis Kehutanan Dan Lingkungan Hidup
7. Tim Teknis Pembangunan PPLB Dan Kajian Strategis Perbatasan
8. Tim Teknis Karantina

Perkembangan Sosek Malindo dari tahun ketahun menunjukkan kemajuan yang berarti. Hal ini dapat dilihat dari semakin luasnya cakupan pembahasan dan kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan Malaysia, meskipun dalam implementasinya masih banyak di temui hambatan yang harus diatasi oleh kedua belah pihak.

B. Pengembangan Kawasan Pariwisata di Kabupaten Sambas

1. Pengertian Pariwisata

Istilah pariwisata berasal dari kata pari yang berarti banyak atau berkali-kali dan wisata yang berarti berpergian dengan tujuan bersenang-senang baik sendirian maupun kelompok (Kamus Tata Ruang, 2007 : 145). Didalam UU No.10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan disebutkan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pariwisata juga berarti perpindahan orang untuk sementara dan dalam jangka waktu pendek ke tujuan-tujuan diluar tempat mereka biasanya hidup dan bekerja, dan kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di tempat-tempat tujuan tersebut dan biasanya wisatawan tersebut membelanjakan uangnya (Soekadji, 2000 : 144). Sedangkan menurut McIntosh (1995 : 132) pariwisata didefinisikan sebagai gabungan gejala dan hubungan yang timbul dari interaksi wisatawan, bisnis, pemerintah serta masyarakat dalam proses menarik dan melayani wisatawan.

Pariwisata menurut Fandeli (1995 : 178) juga berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan wisata termasuk perusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang tertarik di bidang tersebut. Menurut Yoeti (1990), pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu dan diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan tujuan semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya atau memenuhi keinginan yang beraneka ragam. Sedangkan Wahab (1992 : 211) memandang pariwisata sebagai suatu kegiatan kemanusiaan yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara bergantian diantara orang-orang di daerah tertentu untuk sementara waktu dalam mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang dialaminya ditempat ia memperoleh pekerjaan tetap.

Sedangkan menurut Gunn (1988 : 188), pariwisata sebagai sebuah aktivitas ekonomi yang memiliki aspek permintaan (*demand side*) dan aspek penawaran (*supply side*) sehingga diperlukan sebuah kemampuan perencana untuk menghasilkan sebuah rencana pengembangan pariwisata yang dapat mengintegrasikan dua aspek permintaan dan penawaran tersebut agar tercapai keberhasilan perencanaan pengembangan pariwisata di suatu daerah. Melihat beberapa pengertian tentang pariwisata tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa pariwisata membicarakan suatu perjalanan oleh seseorang atau sekelompok orang ke suatu tempat/objek wisata yang dilakukan untuk sementara waktu untuk bertamasya dan menikmati segala fasilitas dan

pelayanan yang disediakan tempat tujuan tersebut. Apabila dikaitkan dengan pariwisata air maka segala sesuatu yang dikaitkan dengan bertamasya dengan kegiatan menikmati objek wisata kawasan perairan dengan fasilitas dan pelayanan tersedia yang mendukung kegiatan atraksi wisata air.

2. Jenis Pariwisata

Sebagai sebuah industri, pariwisata harus mempunyai modal kepariwisataan yang dapat menarik wisatawan tertarik berkunjung dan kembali datang lagi ke tempat yang sama di lain waktu. Menurut Pendit (1999: 211), ada motif wisatawan mengunjungi suatu tempat yang diklasifikasikan berdasarkan jenis-jenis pariwisata yang adalah sebagai berikut :

1. Wisata Budaya yaitu suatu perjalanan wisata yang dilakukan atas keinginan memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan kunjungan atau peninjauan ke tempat lain untuk mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan adat istiadat, cara hidup, budaya dan seni mereka.
2. Wisata Tirta yaitu jenis wisata dengan kegiatan yang ditunjang oleh sarana dan prasarana di suatu badan air seperti di danau, pantai, laut, sungai. Kegiatan yang biasanya dilakukan adalah olahraga air berupa berlayar, menyelam, berselancar, memancing, mendayung, ataupun kegiatan menikmati keindahan alam di danau, pantai, maupun kehidupan bawah laut.
3. Wisata Cagar Alam yaitu wisata dengan tujuan perjalanan ke tempat-tempat yang telah dilindungi oleh undang-undang seperti daerah cagar alam, taman margasatwa, hutan lindung. Wisata ini dilakukan dalam kaitannya dengan kegemaran akan keindahan alam, kesegaran hawa udara, keajaiban kehidupan liar hewan maupun tumbuhan.
4. Wisata Agrowisata yaitu wisata dengan tujuan perjalanan ke tempat proyek-proyek pertanian, perkebunan, ladang pembibitan dan sebagainya, dimana wisatawan dapat mengadakan kunjungan dan peninjauan untuk studi maupun melihat-lihat sekeliling sambil menikmati segarnya tanaman beranekaragam warna dan suburnya pembibitan berbagai jenis sayur mayur dan palawija di lokasi yang dikunjungi.
5. Wisata Buru yaitu jenis wisata yang dilakukan pada daerah daerah yang telah disetujui oleh pemerintah sebagai tempat berburu hewan liar. Biasanya dilakukan pada musim tertentu dan jangka waktu yang terbatas sehingga tidak mengganggu keseimbangan ekosistem maupun lingkungan.
6. Wisata Ziarah yaitu wisata yang banyak dikaitkan dengan agama, sejarah dan adat istiadat. Biasanya dilakukan ke tempat-tempat suci, makam orang besar atau pemimpin besar, wali, atau tempat-tempat keramat lainnya.
7. Wisata lainnya berupa jenis wisata lainnya yang sesuai perkembangan industri pariwisata seperti wisata kuliner, museum, konvensi ataupun wisata belanja dan lain lain.

3. Sistem Pariwisata

Pariwisata sebagai suatu sistem berarti pariwisata mempunyai komponen-komponen yang menjadi sub sistem dan komponen tersebut saling berinteraksi dan terkait satu sama lain. Ada berbagai macam literatur yang dibuat mengenai komponen wisata, menurut Mill dan Morrison (1985 : 166) pariwisata sebagai sebuah sistem yang terikat satu sama lain dengan komponennya adalah perjalanan wisata, pasar wisata, tujuan wisata dan pemasaran wisata. Dari keterkaitan tersebut, terdapat elemen-elemen pariwisata yaitu aspek permintaan (*demand*) yaitu jumlah total dari orang-orang yang melakukan perjalanan dengan cara menggunakan fasilitas wisata beserta pelayanannya di tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka maupun tempat mereka bekerja, dan yang kedua adalah aspek pelayanan (*supply*) yang terdiri dari berbagai macam jenis fasilitas dan pelayanan yang digunakan wisatawan dan bisa dikelompokkan ke dalam beberapa sektor yaitu atraksi, akomodasi, transportasi, infrastruktur serta fasilitas dan jasa lainnya.

Sistem pariwisata menurut Gunn (1988 : 225) dibagi dua komponen yaitu aspek permintaan (*demand*) berupa penduduk yang mempunyai keinginan dan mampu untuk melakukan perjalanan wisata dan aspek penawaran (*supply*) berupa unsur utama berupa daya

tarik wisata yang menjadi pemicu pariwisata; unsur prasyarat yaitu transportasi yang menjadi prasyarat proses berlangsungnya kegiatan pariwisata; unsur penunjang berupa informasi dan promosi yang menjadi penggerak dan pendorong minat berwisata; serta unsur penunjang lainnya berupa fasilitas pelayanan yang membuat proses kegiatan pariwisata berjalan lebih mudah, nyaman, aman dan menyenangkan dengan ketersediaan berbagai macam fasilitas wisatawan.

Hubungan antar elemen sistem pariwisata menurut Gunn seperti digambarkan pada Gambar 3 tentang Sistem Pariwisata Sistem pariwisata juga terkait dengan aspek ekonomi dengan empat unsur pokok yang saling terkait membentuk suatu sistem yaitu permintaan atau kebutuhan, penawaran atau pemenuhan akan kebutuhan berwisata, pasar dan kelembagaan yang berperan memfasilitasi keduanya serta pelaku atau aktor yang menggerakkan ketiga unsur tersebut (Damanik, 2006:233).

- a) Aspek Penawaran
- b) Aspek Permintaan

Di dalam aspek permintaan terdapat bagian segmentasi pasar yang menjadi langkah pengelompokan manusia berdasarkan kesamaan kebutuhan dan keinginan sebagai bagian dari target pasar yang potensial (Gunn, 1995). Segmentasi pasar merupakan sebuah pengklasifikasian atau pembagian wisatawan yang memiliki minat atau ketertarikan mengunjungi dan melakukan kegiatan wisata dengan mengelompokkannya sesuai kebutuhan dan keinginan wisatawan sebagai bagian dari tujuan dan pelayanan pasar (Mill dan Morrison, 1985). Hal ini membuat segmentasi pasar merupakan bagian dari sebuah usaha pemasaran agar efektif karena ada proses identifikasi suatu lokasi wisata berdasarkan target pasar dengan cara mengumpulkan informasi mengenai wisatawan dan pendataan objek beserta atraksi dan jenis wisatawan yang tertarik dengan wisata tersebut.

4. Pengembangan Kawasan Pariwisata di Kabupaten Sambas

Pengembangan kepariwisataan berhubungan dengan pelestarian nilai-nilai kepribadian dan budaya bangsa dalam memanfaatkan potensi berupa keindahan dan kekayaan alam. Pariwisata merupakan salah satu potensi yang dapat digali dan dikembangkan, berupa sumber alam dan sosial budaya pada suatu daerah, sehingga potensi daerah tersebut dapat dikembangkan menjadi salah satu objek wisata. Pemanfaatan potensi daerah disini lebih berarti mengelola, memanfaatkan dan melestarikan setiap potensi yang ada, dimana potensi tersebut dirangkai menjadi satu daya tarik wisata. Oleh karena itu pengelolaan dan pemanfaatan potensi pariwisata yang dimiliki daerah juga dikelola oleh masing-masing daerah. Begitu juga halnya dengan Kabupaten Sambas, dimana Kabupaten Sambas memiliki banyak potensi dan sumber daya alam yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata. Berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sambas untuk melakukan pengembangan suatu kawasan wisata sebagai daya tarik wisata. Salah satu tujuannya adalah untuk menarik perhatian lebih banyak pengunjung terhadap wisatawan yang senang dengan keindahan dan panorama alam maupun keberagaman aktifitas-aktifitas wisata yang terdapat dikawasan wisata sebagai daya tarik wisata yang berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Sambas telah membuat Rencana Tata Ruang Kawasan Wista (RTKW) dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu :

- a. Aspek Kebijakan
- b. Aspek Ekonomi
- c. Aspek Fisik dan Sumber Daya Alam
- d. Aspek Sosial dan Budaya
- e. Aspek Pelayanan Prasarana Kawasan
- f. Aspek Hukum dan Kelembagaan

Terkait dengan teori perencanaan, agar pariwisata disuatu daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan, maka sudah sewajarnya para pembuat kebijakan yang bermaksud mengembangkan pariwisata di wilayah kerjanya harus melakukan serangkaian kegiatan perencanaan. Pentingnya perencanaan dalam pengembangan pariwisata disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut (Paturusi, 2008) :

1. Kegiatan pariwisata merupakan suatu kegiatan ekonomi yang relatif baru. Dengan demikian pemerintah dan pihak swasta memiliki informasi dan pengalaman yang terbatas tentang bagaimana mengembangkan sektor pariwisata dengan baik. Perencanaan pariwisata dapat menjadi arahan dan pedoman dalam mengembangkannya.
2. Kegiatan pariwisata merupakan kegiatan yang sangat kompleks, multisektoral, dan melibatkan berbagai bidang seperti pertanian, perikanan, manufacturing, kebudayaan, pertamanan, berbagai fasilitas pelayanan dan jasa, transportasi, dan infrastruktur lainnya. Perencanaan dan koordinasi untuk memadukan unsur-unsur tersebut menjadi mutlak.
3. Pariwisata dapat mendatangkan keuntungan ekonomis baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan perencanaan yang baik, keuntungan ini dapat dioptimalkan.

Sesuai dengan teori tersebut, maka Rencana tata ruang kawasan wisata yang telah dibuat tersebut dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan kawasan wisata di Kabupaten Sambas. Melihat dari aspek-aspek RTRKW tersebut, memungkinkan untuk perkembangan kawasan wisata sebagai daya tarik wisata yang diharapkan. Oleh karena itu perlunya penegasan tentang RTRKW ini untuk mengantisipasi berbagai kejadian yg tidak diinginkan, karena aspek-aspek ini berdasarkan hasil pengamatan sebelumnya yang disesuaikan dengan kondisi kawasan wisata.

Pemerintah Kabupaten Sambas juga telah membentuk POKWADARWIS (Kelompok Sadar Wisata) di desa-desa didekat kawasan wisata. Kelompok ini beranggotakan dari pemuda pemudi setempat. Kelompok ini dibentuk berdasarkan kepada masyarakat yang peduli akan pariwisata khususnya untuk pengelolaan kawasan wisata di Kabupaten Sambas. Intinya, pembentukan kelompok ini didasarkan kepada siapa saja yang benar-benar peduli akan pariwisata tanpa ada pemaksaan dari pihak manapun. Berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh kelompok ini, salah satunya yaitu dengan membentuk penjaga tiket, menyediakan sarana dan prasarana dari bantuan dana yang telah diberikan, dll.

Adapun Program yang dilakukan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sambas untuk meningkatkan kegiatan wisata antara lain :

1. Program Pengembangan Nilai-nilai Budaya, dengan kegiatan:
2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
3. Program pengembangan pemasaran pariwisata
4. Program pengembangan destinasi pariwisata
5. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

Upaya-upaya dilakukan pemerintah dalam pengembangan kawasan pariwisata sudah terlaksana, hanya saja masih ada kendala-kendala atau faktor-faktor penghambat bagi pemerintah untuk mengembangkan kawasan wisata ketahap yang memungkinkan. Perlunya kerjasama yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan dan melibatkan masyarakat setempat untuk menjalankan kegiatan pariwisata sehingga masyarakat, pemerintah maupun pelaku usaha kawasan wisata nantinya dapat menikmati hasil dari kegiatan pariwisata tersebut.

5. Bentuk Kerjasama antara Malaysia dan Indonesia Dalam Bidang Pariwisata.

Bentuk kerjasama antara Malaysia dan Indonesia dalam bidang pariwisata sebagaimana yang tercantum dalam berikut Memorandum Kerjasama Malaysia-Indonesia, 1990 antara lain :

- a. Penelitian dan Pengembangan
- b. Pendidikan dan Pelatihan
- c. Promosi
- d. Pertukaran Program
- e. Promosi Regional
- f. Perhubungan Udara
- g. Kerjasama Sektor Wisata

Adapun kerjasama antara Indonesia dan Malaysia adalah untuk menciptakan hubungan baik diantara kedua Negara tersebut. Kerjasama tersebut terjalin disebabkan oleh perilaku interaksi masyarakat perbatasan di kedua negara tersebut yang dipicu oleh adanya kesamaan adat-istiadat, etnis dan juga bahasa yang mereka miliki. Kesamaan-kesamaan sosio-kultural itu yang kemudian memunculkan terciptanya hubungan sosial dan ekonomi secara tradisional di

antara mereka. Faktor kesamaan-kesamaan tersebut tentu saja dapat menjadi modal dasar untuk melakukan interaksi yang saling menguntungkan. Maka dari itu, Indonesia dan Malaysia membuat kesepakatan berupa kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia atau disingkat menjadi Sosek Malindo, yang salah satunya isinya membahas kerjasama di bidang pengembangan kawasan pariwisata.

B. Kerjasama Sosek Malindo Dalam Pengembangan Kawasan Pariwisata Di Kabupaten Sambas

Kerjasama Sosek Malindo di bidang Pariwisata dan Kebudayaan terangkum pada buku Kertas Kerja yang dibahas dalam sidang tahunan Sosek Malindo Tingkat Daerah. Adapun Kertas Kerja ini merupakan tindakan susulan / tindakan lanjut dari Keputusan Mensyuarat Tim-Tim Teknik Bersama Peringkat Negeri Sarawak dan Tingkat Daerah Kalimantan Barat. Berdasarkan Hasil Kertas Kerja Sidang ke-29 Sosek Malindo KK/JKK Sosek Malindo Tingkat Provinsi – Peringkat Negeri Kalimantan Barat – Sarawak yang berlangsung dari tanggal 22 hingga 24 Oktober Tahun 2013 di Hotel Novotel Mangga Dua Jakarta. Kertas Kerja ini merupakan hasil pembahasan dan keputusan bersama Tim Teknis Pariwisata/Pelancongan dan Kebudayaan Sosek Malindo Tingkat / Peringkat Provinsi Kalimantan Barat dan Negeri Sarawak yang akan menjadi bahan laporan atas pelaksanaan kesepakatan dan kemajuan bersama Bidang Pariwisata / pelancongan dan Kebudayaan. Kerjasama Bidang Pariwisata / pelancongan dan Kebudayaan antara lain :

1. Kerjasama Pariwisata/Pelancongan meliputi :
 - a. *Joint Development and Promotion* yaitu:
 - b. Pusat Informasi dan *Joint Notice Board*
 - c. *Joint Exit survey*
 - d. Pemberitahuan Kegiatan Pariwisata/pelancongan
 - e. Kerjasama Kawasan Ekopelancongan / Ecotourism
2. Kerjasama Kebudayaan meliputi :
 - a. Muzium/Museum, mensuarat telah bersetuju supaya kedua-dua muzium/museum merancang dan melaksanakan program-program yang telah dipersetujui.
 - b. Kerjasama Kebudayaan dan Kesenian.
 - c. Kerjasama Sejarah dan Nilai Budaya, Kerjasama antara Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Kalbar dengan Muzium Sarawak antara lain dalam Kongres Budaya Daerah Kalbar adalah aktiviti tahunan dan pihak Sarawak akan diundang, Kerjasama pertukaran naskah dan manuskrip antara kedua belah pihak, dicadangkan kegiatan Lawatan Sejarah Borneo.
 - d. Kerjasama Perlindungan barang antik/ benda cagar budaya, dimana kedua belah pihak sepakat untuk melindungi Barang Antik/Benda Cagar Budaya berdasarkan *Sarawak Cultural Heritage Ordinance*, 1993 bagi Negeri Sarawak dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, tentang Cagar Budaya bagi pihak Kalbar, Indonesia. Kedua belah pihak bersetuju mencegah dan membantu dalam menyelesaikan persolan yang berkaitan dengan benda cagar budaya/ benda antik yang masuk secara illegal/haram di kedua negara, Kedua belah pihak sepakat memberitahukan pada masyarakat di kedua negara agar mendaftarkan benda antic/ benda cagar budaya yang dimiliki kepada pihak yang berwenang/bertanggungjawab sesuai peraturan yang berlaku/digunapakai di kedua negara, Kedua belah pihak sepakat saling bertukar informasi mengenai keberadaan benda antik/ benda cagar budaya yang bermasalah di masing-masing negara, mengusulkan kepada Tim Teknis Pencegahan Penyelundupan (Custom/Bea dan Cukai, Polis/Polisi dan Imigresen/imigrasi untuk mencegah keluar masuk/pergerakan barang antik/ benda cagar budaya secara illegal/ haram sesuai aturan/peraturan masing-masing negara, mengintensifikasikan sosialisasi/penyuluhan (mewar-warkan) kepada masyarakat perbatasan di kedua belah negara dengan melibatkan instansi terkait/agensy yang berkaitan, dan melaksanakan dialog tentang perlindungan dan pengamanan benda cagar budaya/ barang antic antara dua negara.

- e. Kerjasama hal-hal lain antara lain : *Development of Student Tourism*, kedua belah pihak bersetuju untuk mengembangkan/membangunkan sektor pelancong pelajar (kegiatan wisata pelajar, pramuka) antara Kalimantan Barat dan Sarawak serta program pertukaran pelajar/ student exchange perlu di pupuk, *Journalist dan Travel Writer FAM Trip*, kedua belah pihak bersetuju agar semua biaya FAM Trip yang dipersetujui ditanggung dalam wilayah masing-masing (tidak termasuk biaya perjalanan ke dan dari tempat asal), kedua belah pihak bersetuju untuk mengeksyorkan penambahan frekuensi/ kekerapan penerbangan Kuching-Pontianak, dicadangkan penggunaan pelekat dan Logo khas Sosek Malindo khusus untuk bis/bas kendaraan pariwisata/pelancongan, dan dicadangkan program Lawatan se Borneo, yang diikuti oleh Indonesia (Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) dan Malaysia (Sarawak dan Sabah) dan Brunei Darussalam.

C. Komitmen Pemerintah dalam Kerjasama Sosek Malindo di bidang Pariwisata dan Kebudayaan kaitannya dengan Pengembangan kawasan Pariwisata di Kabupaten Sambas.

Konsep pemerintah dalam upaya meningkatkan kerjasama Sosek Malindo di bidang Pariwisata/pelancongan dan kebudayaan sudah cukup baik, namun dalam tahapan implementasinya masih saja ada beberapa kendala-kendala dalam proses pelaksanaannya. Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa kurang optimalnya pemerintah dalam upaya meningkatkan kerjasama Sosek Malindo di Bidang Pariwisata ini masih saja di sebabkan oleh permasalahan yang lama yaitu selalu berubah-ubahnya tataran struktur birokrasi yang mana sering kali karena kebijakan atau kepentingan politik dan lain sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah belum dapat melakukan perannya dengan baik dalam pembangunan perbatasan. Ini dibuktikan dengan kurang tanggapnya pemerintah daerah Kabupaten Sambas mengenai kerjasama Sosek Malindo di Bidang Pariwisata/pelancongan dan kebudayaan, mengingat Kabupaten Sambas merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Kalimantan Barat, mengingat letak kawasan Kabupaten Sambas ini sangat strategis yaitu berbatasan langsung dengan Malaysia Timur. Selain itu, Kabupaten Sambas juga memiliki berbagai potensi dibidang pariwisata yang tidak kalah bagusnya dengan daerah-daerah lain yang ada di Kalimantan Barat. Pariwisata di daerah perbatasan khususnya Kabupaten Sambas yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai objek wisata bagi turis lokal dan mancanegara seperti Malaysia. Kemudian dengan adanya pembukaan/pengoperasian CIQS Aruk Biawak Aruk di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas untuk membangun industry pelancongan/pariwisata, maka diharapkan nantinya akan ada peluang kerjasama dalam bidang pariwisata dengan Sarawak, Malaysia terkait masalah tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Lemahnya diplomasi karena aktor pelaksana diplomasi adalah birokrat yang posisinya sering berganti sehingga personil yang terlibat kurang menguasai isu-isu yang dibahas dalam sidang, disamping itu diplomasi yang dilakukan belum melibatkan partisipasi yang luas dari aktor pelaksanaannya
2. Kurangnya komitmen pemerintah untuk melibatkan pihak-pihak luar Pemerintah seperti NGO dan *Civil society* dalam kerjasama Sosek Malindo. NGO yang dilibatkan adalah NGO yang memang profesional dalam isu-isu yang sesuai dengan tim teknis.

B. Saran

1. Menyelaraskan berbagai agenda kebijakan, program dan kegiatan yang terkait dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan pariwisata di daerah perbatasan dengan cara meningkatkan hubungan kerjasama Sosek Malindo dibidang ekonomi khususnya pariwisata antara kedua Negara baik Kalbar, Indonesia dengan Sarawak, Malaysia.

2. Perlu adanya restrukturisasi organisasi dengan hanya melibatkan anggota yang paham betul dan aktif dalam Sosek Malindo daripada menempatkan personil hanya karena jabatan birokratis yang diembannya.

DAFTAR REFERENSI

- Aelenai, Victor. 2001. *Teoria Si Tactica Del Frontiera (Theory The Tactic Of Frintier)* Vol.2. Ed Pro Transilvania. Bucuresti.
- Badan Pusat Statistik. Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2012.
- Bappeda Propinsi Kalbar Tahun 2012
- Damanik, Janinton ; Weber, Helmut F. 2006. *Perencanaan Ekowisata (Dari Teori Ke Aplikasi)*. Yogyakarta : PUSPAR UGM dan Penerbit ANDI.
- Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2012. *Pariwisata Kota Sambas*.
- Djelanik, Sukawarsini. 2008. *Diplomasi : Antara Teori dan Praktek*. Jogjakarta : Graha Ilmu.
- Fandeli, Chafid. 1995. *Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisataaan Alam*. Yogyakarta : Liberty.
- Giddens, A. 1985. *The Nation-state and Violence*. Vol. 2 of Contemporary History of Historical Materialism. Polity Press. Cambridge.
- Guo, R. 2005. *Cross Border Resource Management, Theory and Practice*. Asterdam : Elsevier.
- Gunn, Clare. 1988. *Tourism Planning*. New York : Taylor & Franciss.
- Koentjaraningrat. 1998. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : PT. Gramedia.
- Miller, Katherine. 2002. *Communication Theories. Perspective, Processes, and Contexts*. United States of America: McGraw-Hill. Hal 28.
- Moleong, Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi refisi. Cetakan ke 17. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nugrahaningsih, Nurfitri. 2013. *Disertasi : "KERJASAMA BILATERAL INDONESIA-MALAYSIA : Studi Tentang Sosek Malindo dalam Pembangunan Pos Pemeriksaan Lintas Batas di Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang – Kalimantan Barat*. Bandung : Universitas Padjadjaran.
- Rudy, T May. 1993. *Teori, Etika, dan Kebijakan Hubungan Interansional*. Bandung : Angkasa.
- Roy, S.L. 1991. *Diplomasi*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Satori, D. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. Bandung.
- Satow, Sir Ernest Satow's. 1998. *Guide to Diplomatic Practice*. New York : 5th Edition, Longman Publishing Group.
- Sir Harold Nicolson. 1988. *Diplomacy*. Washington : Institute for The Study Diplomacy Editio.
- Spillane, James. 1994. *Ekonomi Pariwisata, Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta : Kanisius.
- Sudarwan, Dawim. 2002. *Menjadi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia.
- Sudjarwo. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung : Mandar Maju.
- Sugiyono. 2008. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suratman, Eddy. (2008). *Kawasan Perbatasan dan Pembangunan Daerah*. Pontianak : Untan Press.
- Tarigan, R. 2004. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Yusuf, Sufri. 1999. *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri: Sebuah Analisis dan Uraian Tendang Pelaksanaannya*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Wahab, Salah. 1992. *Manajemen Kepariwisataaan*. Terjemahan Frans Gromang. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Warpani, Suwardjoko. 2007. *Pariwisata Dalam Tata Ruang Wilayah*. Bandung : Institut Teknologi Bandung.
- Yoeti, Oka. 1990. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung : Angkasa.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, **Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008** Tentang Wilayah Negara.

Indonesia, **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004** Tentang Pemerintahan Daerah.
Indonesia, **Undang Undang No 10 Tahun 2009** Tentang *Kepariwisataan*.
Indonesia, **Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1997** tentang Tata Ruang Wilayah Nasional.
Indonesia, **Keputusan Presiden No. 13 Tahun 2011** tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Sub Regional.
Indonesia, **Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1994** tentang Badan Pengendali Pembangunan Kawasan Perbatasan.

Web Site :

<http://en.wikipedia.org/wiki/diplomasi>

<http://en.wikipedia.org/wiki/sosial>

<http://en.wikipedia.org/wiki/ekonomi>

<http://en.wikipedia.org/wiki/sosial-ekonomi>

[http://www.google.com/Tempat Wisata di Kabupaten Sambas - \(\(\(twonet rad io\)\)\).htm](http://www.google.com/Tempat_Wisata_di_Kabupaten_Sambas_-_(((twonet_rad_io))).htm)

<http://harian.equator.com/2011/09/22/pplb-aruk-sajingan-besar-belum-beroperasi-optimal>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:sambas.svg>

Dokumen :

Laporan Hasil Sidang ke – 29 Sosek Malindo KK/JKK Sosek Malindo tingkat Provinsi – Peringkat Negeri Kalimantan Barat – Sarawak Tahun 2013 oleh Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Kalimantan Barat.